

Lembar Jawaban UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) GENAP TA 2025/2026

Nama: Akwila Febryan Santoso

NIM: 235150201111057

No Absen: 26

Jawaban:

1. Nilai nilai yang menjadi bentuk struktur masyarakat Nusantara pada waktu itu seperti yang ada di kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Kutai Kartanegara memberikan kontribusi dan dampak yang signifikan terhadap perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai yang sudah ada dan diterapkan pada masyarakat sekitar pada zaman kerajaan dulu. Misalkan pada zaman kerajaan masyarakat disana memiliki kepercayaan terhadap roh ataupun para dewa yang menunjukkan hubungan antara manusia dan Tuhan. Hal inilah yang menjadi landasan bagi sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi meskipun berbeda dari yang sekarang namun nilai ketuhanan tersebut sudah ada bahkan dari zaman kerajaan bahkan jauh sebelum itu juga.

Nilai lainnya adalah nilai kebersamaan dan musyawarah yang dapat dilihat dari kegiatan atau tradisi kenduri dan sedekah kepada para Brahmana pada zaman kerajaan Kutai Kartanegara. Bisa dilihat dari kondisi tersebut telah menjadi cikal bakal nilai-nilai yang terdapat di Pancasila saat ini. Selain itu juga istilah seperti Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit. Pancasila sendiri diambil dari Kakawin Negarakertagama dan Kitab Sutasoma. Hal ini menunjukkan bahwa nilai nilai dari zaman kerajaan Nusantara telah memberikan kontribusi terhadap Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia sampai saat ini.

2. Memang perdebatan mengenai tanggal lahir Pancasila masing sering menjadi topik yang sering dibicarakan dan perlu dilakukan analisis serta pemahaman mengenai dua tanggal tersebut yang mencerminkan dua pendekatan yang berbeda. Pertama pada tanggal 1 Juni dapat dilihat dari sudut pandang historis karena pada tanggal tersebut Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno sebagai konsep dasar negara dalam sidang BPUPKI. Dalam sidang tersebut juga diperkenalkan istilah Pancasila pertama kali dan menjadi tonggak awal perumusan Pancasila sebagai Ideologi bangsa. Namun perlu dilihat juga dari perspektif kedua pada tanggal 18 Agustus 1945 bisa dilihat dari perspektif hukum tata negara karena pada tanggal tersebut Pancasila secara resmi disahkan. Pengesahan tersebut juga menjadikan Pancasila tidak hanya sebagai gagasan tetapi juga sebagai norma fundamental negara yang berlaku secara konstitusional.

Jadi jika mengenai nilai historis dan semangat mengenai lahirnya gagasan pancasila maka 1 Juni merupakan hari lahir Pancasila. Namun kalau mau dikatakan secara hukum dan

konstitusional maka 18 Agustus merupakan momen dimana Pancasila tersebut disahkan. Maka dari itu kalau saya lebih menuju pada tanggal 1 Juni dimana hari tersebut lahir dan muncul gagasan Pancasila pertama kalinya. Namun jika ada mengatakan tanggal 18 Agustus pun juga menurut saya sah saja karena pada tanggal tersebut merupakan pengesahan Pancasila dari sudut pandang hukum. Sehingga kedua sudut pandang tersebut bisa saling melengkapi dalam konteks sejarah dan juga konstitusi Indonesia.

3. A. Istilah *Genetivus Objectivus* merupakan konsep dimana pancasila merupakan objek dari pemikiran dan perenungan bangsa Indonesia. Nilai-nilainya dianggap telah ada dan hidup dalam budaya serta tradisi masyarakat Nusantara jauh sebelum kemerdekaan dan hanya ditemukan kembali oleh para pendiri bangsa. Sedangkan istilah *Genetivus Subjectivus* memandang pancasila sebagai pandangan hidup dan sebagai hasil berfikir serta kesadaran bangsa Indonesia yang digunakan untuk merumuskan dan menetapkannya sebagai dasar negara.

B. Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, Soekarno menjelaskan bahwa Pancasila tidak hanya sekadar dasar hukum formal negara, tetapi juga memiliki kedudukan sebagai *Philosophische Grondslag* dan *Weltanschauung*. *Philosophische Grondslag* sendiri berarti dasar filsafat berupa fundamen, pikiran yang mendalam yang menjadi dasar pembentukan struktur negara dan pemerintahan di mana Pancasila menjadi dasar untuk menilai segala kebijakan, hukum, dan sistem kenegaraan. Sedangkan *Weltanschauung* mengacu pada Pancasila lebih dalam dari sekadar asas negara. Pancasila dinilai sebagai cara pandang hidup yang bersifat praktis bangsa Indonesia dalam memaknai kehidupan, kebersamaan, dan hubungan dalam bermasyarakat. Dalam hal ini, Pancasila menjadi sumber inspirasi dan arah kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Salah satu contoh nyata penerapan *Weltanschauung* Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dalam kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat. Misalnya ketika warga bergotong royong membersihkan selokan atau memperbaiki jalan desa tanpa pamrih. Hal tersebut telah mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong yang merupakan perwujudan dari sila kedua dan kelima Pancasila.

4. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki ciri-ciri utama seperti fleksibilitas, keterbukaan, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa melupakan nilai dasarnya. Dalam penerapannya di Indonesia terlihat dari kemampuan Pancasila untuk mengakomodasi keberagaman budaya, suku, dan agama. Selain itu juga Pancasila dapat adaptif terhadap tantangan global seperti digitalisasi, demokratisasi, dan krisis lingkungan. Misalnya, bisa dilihat dari gencarnya digitalisasi yang ditakutkan menggerus nilai-nilai dan budaya lokal. Namun hal tersebut dapat

diadaptasi dengan menyesuaikan perkembangan zaman dimana menggabungkan teknologi dan juga budaya lokal.

Berbeda dengan ideologi tertutup yang bersifat kaku dan sering kali menolak perubahan sering kali dipaksakan dari atas dan tidak memberikan ruang diskusi. Disini tentu sangat berbeda dimana Pancasila mendorong adanya komunikasi dan partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan berbangsa. Ideologi tertutup cenderung sulit mengikuti perkembangan zaman dan membatasi kebebasan berpikir sedangkan Pancasila sangat dinamis mampu mengikuti perkembangan zaman dan memberi kebebasan bersuara.

5. A. Kebijakan yang mewajibkan warga berpenghasilan rendah untuk membayar retribusi tinggi dalam layanan kesehatan jelas tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila khususnya sila kedua dan sila kelima. Sila kedua berisi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” yang menekankan pentingnya empati, kemanusiaan, dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat. Hal ini menjadi miris karena banyak orang merasa tertekan dengan kebijakan tersebut terutama bagi mereka yang mayoritas memiliki pendapatan yang rendah. Selain itu juga hal tersebut tidak sejalan dengan sila kelima yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang menekankan keadilan yang merata termasuk akses yang setara terhadap pelayanan publik tanpa diskriminasi ekonomi. Di tengah kondisi Indonesia yang masih memiliki kesenjangan sosial dan banyak daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, kebijakan semacam ini justru memperburuk ketimpangan dan bertentangan dengan semangat Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat.

B. Pada daerah saya sendiri memiliki kebijakan untuk melakukan gotong royong membersihkan got dan fasilitas umum di kompleks perumahan karena sering terjadi banjir ketika hujan lebat. Hal tersebut sangat mencerminkan nilai Pancasila terutama sila tiga yaitu “Persatuan Indonesia” dimana kegiatan tersebut memperkuat solidaritas sosial dan rasa kebersamaan antarwarga. Selain itu, kebijakan ini juga berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan warga dengan mencegah banjir dan juga kenyamanan saat menggunakan fasilitas.

6. A. Dalam teori Hans Kelsen yang merupakan pengembangan dari teori hukum Kelsen, Pancasila sebagai *Stattfundamentalnorm* yang berarti bahwa Pancasila adalah norma dasar tertinggi yang menjadi sumber dari semua norma hukum di Indonesia. Sebagai norma dasar maka Pancasila menjadi fondasi dan ideologis dalam pembentukan Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintahan. Artinya setiap kebijakan maupun UUD yang dibuat harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan ketuhanan.

B. Untuk memastikan bahwa seluruh peraturan dan kebijakan selaras dengan Pancasila sebagai norma fundamental, dapat dibentuk sebuah lembaga khusus di bawah koordinasi langsung Presiden dan DPR, yang setara secara fungsional dengan KPK atau Komnas HAM. Lembaga ini bertugas melakukan pengawasan di tingkat pusat maupun daerah, dengan meninjau dan mengkaji setiap rancangan kebijakan dari sudut pandang nilai-nilai Pancasila sebelum diberlakukan. Proses pengawasan ini dapat melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, ahli hukum, serta perwakilan masyarakat adat untuk menjamin keberagaman perspektif dan menjaga substansi nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap kebijakan publik.

7. Urgensi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman moral dalam bertindak dan bersikap. Berikut merupakan poin-poin urgensi yang penting:
 - Membentuk karakter bangsa yang berlandaskan nilai moral luhur: Pancasila sebagai sistem etika membantu membangun karakter individu dan masyarakat Indonesia agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan kemanusiaan. Ini sangat penting dalam menghadapi tantangan moral di era modern, seperti krisis integritas dan rendahnya empati sosial.
 - Menjaga identitas nasional di tengah pengaruh globalisasi: Globalisasi membawa banyak nilai baru yang tidak selalu selaras dengan budaya dan nilai lokal. Pancasila sebagai sistem etika berperan menjaga jati diri bangsa agar tidak tergerus oleh nilai-nilai asing namun tetap terbuka terhadap perubahan yang positif dan sesuai dengan nilai-nilai pada Pancasila
8. Dalam konteks krisis moral yang melanda Indonesia seperti maraknya korupsi dan ketidakadilan sosial, pengembangan Pancasila sebagai sistem etika menjadi semakin mendesak karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia menjadi terancam. Namun, pada kenyataannya, implementasi nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya terwujud. Misalnya kasus-kasus korupsi besar seperti PT timah dan Pertamina yang melibatkan pejabat tinggi negara dan merugikan negara menunjukkan bahwa Pancasila belum sepenuhnya menjadi pedoman etis dalam praktik kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, meskipun Pancasila memiliki potensi besar untuk menjawab tantangan etis bangsa namun penerapannya sendiri sering kali masih belum maksimal sehingga perlu adanya pengembangan sistem etika yang harus terus diperkuat melalui pendidikan moral, penegakan hukum yang adil, dan juga kesadaran dari masyarakat maupun pemerintah.
9. Ilmu pengetahuan bebas sendiri merujuk pada pendekatan yang melihat pengetahuan sebagai sesuatu yang objektif, netral, dan tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, politik,

atau moral. Sedangkan ilmu pengetahuan terikat nilai menjelaskan bahwa dalam proses pengembangan dan penerapan ilmu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh nilai-nilai karena selalu berkaitan erat dengan kondisi sosial, budaya, dan moral yang melingkupinya. Dalam praktiknya mempertimbangkan nilai-nilai saat menggunakan ilmu pengetahuan sangat penting, terutama dalam kebijakan publik, riset medis, atau teknologi, karena keputusan yang diambil berdasarkan ilmu pengetahuan berdampak langsung pada kehidupan manusia.

Misalnya yang sedang gencar-gencarnya saat ini adalah dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan, jika hanya didasarkan pada efisiensi tanpa mempertimbangkan etika dan keadilan sosial maka dapat menimbulkan diskriminasi ataupun pelanggaran hak asasi manusia terutama para pekerja dan buruh yang terkena langsung dampaknya. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan harus diarahkan untuk kepentingan kemanusiaan dan nilai-nilai harus menjadi pertimbangan .

10. Strategi pengembangan ilmu dalam konteks keindonesiaan yang berpusat pada Pancasila harus mengedepankan prinsip keseimbangan antara kemajuan teknologi dan juga nilai nilai budaya lokal. Hal itu berarti pengembangan ilmu pengetahuan tidak hanya mengejar keuntungan namun tetap mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, serta keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Maka dari itu perlu strategi yang matang untuk menghadapi perubahan:

- Pembuatan Kebijakan Riset yang Berbasis Nilai Pancasila: Pemerintah perlu merumuskan kebijakan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak hanya mengejar kemajuan teknologi, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberagaman budaya. Ini penting agar hasil penelitian benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas dan tidak bertentangan dengan nilai luhur bangsa.
- Integrasi Budaya Lokal dalam Pengembangan Ilmu: Strategi ini menekankan pentingnya menjadikan kearifan lokal sebagai bagian dari pendekatan ilmiah. Dengan mengintegrasikan pengetahuan tradisional dan budaya lokal ke dalam proses riset dan inovasi lalu ilmu yang dihasilkan akan lebih relevan dan dapat diterima oleh masyarakat luas.

Referensi:

- PPT PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH oleh Anggriani Puspitaningrum, M.Pd.
- PPT PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT oleh Anggriani Puspitaningrum, M.Pd.
- PPT PANCASILA SEBAGAI JALAN TENGAH IDEOLOGI DUNIA oleh Anggriani Puspitaningrum, M.Pd.

- Journal: PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA. Link Unduh: <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/download/79642/pdf>
- Journal: Peranan Pancasila Sebagai Landasan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Link: <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4003>